

Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional

Tahun 2000

Tata Negara

EBTANAS-SMA-00-01

Negara merupakan organisasi keraasyarakatan yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang terdiri atas jabatan-jabatan. Pernyataan ini adalah pengertian negara ditinjau dari segi ...

- A. organisasi kekuasaan
- B. organisasi politik
- C. organisasi kesusilaan
- D. organisasi rakyat
- E. organisasi sosial

EBTANAS-SMA-00-02

Perbedaan antara ilmu negara dengan ilmu tata negara terletak pada ...

- A. kerangka ilmunya
- B. konsep pengetahuan
- C. ruang lingkup
- D. latar belakang
- E. kaitannya dengan ilmu lain

EBTANAS-SMA-00-03

Terbentuknya negara Jerman tahun 1990 adalah sebagai contoh terjadinya negara secara "faktual" melalui ...

- A. pendudukan
- B. penyerahan
- C. pencaplokan
- D. pembentukan baru
- E. peleburan

EBTANAS-SMA-00-04

Menurut Jean Jacques Rousseau, kontrak sosial yang bersifat "Volonte de tous" pada terjadinya negara, apabila ...

- A. saat kepala negara diganti
- B. pelaksanaan pemilihan umum
- C. perubahan konstitusi negara
- D. saat negara diproklamasikan
- E. penyerahan mandat kepada penguasa

EBTANAS-SMA-00-05

Tujuan negara menurut teori Shang Yang adalah ...

- A. menciptakan negara yang aman dan sejahtera
- B. membentuk kekuasaan sebesar-besarnya
- C. mengatur kehidupan negara yang tertib
- D. membatasi kekuasaan di daerah-daerah
- E. menciptakan perdamaian dunia yang abadi

EBTANAS-SMA-00-06

Berikut ini fungsi-fungsi negara sebagai usaha mencapai tujuan negara, *kecuali* ...

- A. kepemilikan
- B. pembangun bangsa
- C. adil dan makmur
- D. pengatur negara
- E. pertahanan negara

EBTANAS-SMA-00-07

Perbedaan antara penduduk dengan bukan penduduk terletak pada ...

- A. domisili
- B. pekerjaan
- C. keturunan
- D. agama
- E. jabatan

EBTANAS-SMA-00-08

Dua konsepsi kelautan pada zaman dahulu menimbulkan masalah internasional tentang batas wilayah laut suatu negara adalah ...

- A. maritim dan kontinental
- B. landas benua dan kontinen
- C. Nusantara dan archipelago
- D. zona ekonomi dan territorial
- E. res nullius dan res communis

EBTANAS-SMA-00-09

Contoh wilayah ekstra territorial Indonesia sebagai salah satu unsur negara adalah ...

- A. kapal Indonesia yang berlayar di Nusantara
- B. pulau-pulau kecil dari negara Indonesia
- C. pulau-pulau Indonesia yang belum ada penghuni
- D. kantor dan halaman kedutaan besar Indonesia di Malaysia
- E. kantor dan halaman kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta

EBTANAS-SMA-00-10

Kedaulatan suatu negara tetap ada, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti. Sifat kedaulatan itu menurut Jean Bodin adalah ...

- A. asli
- B. bulat
- C. permanen
- D. terpusat
- E. tidak terbatas

EBTANAS-SMA-00-11

Perbedaan pengakuan de facto dan de jure tentang terbentuknya negara adalah bahwa pengakuan de facto berdasarkan ...

- kenyataan dan de jure berdasarkan hukum internasional
- hukum nasional dan de jure berdasarkan hukum internasional
- hukum internasional dan de jure berdasarkan kenyataan
- deklaratif dan de jure berdasarkan konstitutif
- perjanjian multilateral dan de jure berdasarkan perjanjian internasional

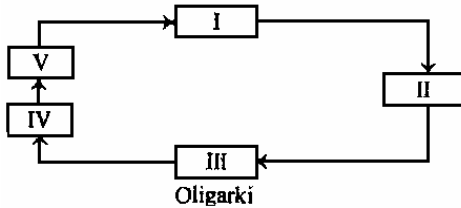
EBTANAS-SMA-00-12

Daerah-daerah lebih banyak bersifat pasif karena menunggu perintah dari pemerintah pusat. Pernyataan ini merupakan kelemahan dari bentuk negara ...

- kesatuan dengan sistem desentralisasi
- federasi dengan adanya negara bagian
- kesatuan dengan otonomi daerah
- kesatuan dengan sistem sentralisasi
- federasi dengan sistem dekonsentrasi

EBTANAS-SMA-00-13

Skema teori siklus Plato



Dari bagan (skema) di atas, maka bentuk pemerintahan oleh seorang yang sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan, ditunjukkan pada nomor ...

- I
- II
- III
- IV
- V

EBTANAS-SMA-00-14

Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer adalah ...

- pemerintah selama jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR
- stabilitas politik dan pemerintahan lebih terjamin
- pemerintah punya waktu untuk melaksanakan programnya
- pemerintah tidak dibayangi dengan adanya krisis kabinet
- pengaruh rakyat terhadap politik pemerintah besar sefcali

EBTANAS-SMA-00-15

Sistem Pemerintahan

No.	Presidensial	No.	Parlementer
1.	Menteri bertanggung jawab kepada presiden,	1.	Menteri bertanggung jawab kepada parlemen
2.	Kedudukan presiden sebagai lambang.	2.	Kedudukan presiden sangat kuat
3.	Program kebijaksanaan kabinet sesuai dengan politik negara.	3.	Program kebijaksanaan ditentukan oleh pemerintah.
4.	Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR	4.	Presiden kedudukannya sebagai lambang

Dari tabel di atas, maka perbedaan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer terletak pada ...

- 1 dan 2
- 1 dan 3
- 1 dan 4
- 2 dan 3
- 2 dan 4

EBTANAS-SMA-00-16

Pemilihan umum merupakan penyerahan hak dari rakyat kepada pemerintah dengan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun. Pernyataan ini sesuai dengan ...

- aturan kampanye
- hak pilih aktif
- prinsip demokrasi
- dasar langsung
- hak pilih pasif

EBTANAS-SMA-00-17

Perbedaan pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan adalah pembagian kekuasaan mempunyai arti ...

- distribusi kekuasaan, sedangkan pemisahan kekuasaan "Trias Politika"
- trias politika, sedangkan pemisahan kekuasaan "Checks and Balances"
- ciri khas Inggris, sedangkan pemisahan kekuasaan Amerika Serikat
- pemerintahan liberal, sedangkan pemisahan kekuasaan sosialis
- sistem Eropa, sedangkan pemisahan kekuasaan sistem Amerika

EBTANAS-SMA-00-18

Negara hukum menurut pengertian yang terkandung dalam UUD 1945 adalah ...

- menjaga ketertiban dan keamanan seluruh warga negara
- menjaga dan menindak para pelanggar aturan hukum
- memberikan pelayanan seluas-luasnya hak asasi manusia
- menempatkan hukum berada dalam kehidupan masyarakat
- melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan bangsa

EBTANAS-SMA-00-19

Salah satu unsur negara hukum menurut A.V. Dicey , adalah ...

- A. supremasi aturan hukum
- B. semua undang-undang tertulis
- C. pemisahan kekuasaan
- D. peradilan tata usaha negara
- E. pemerintahan secara demokrasl

EBTANAS-SMA-00-20

Hak asasi manusia bersifat universal artinya ...

- A. berlaku bagi seluruh negara-negara yang merdeka
- B. berlaku bagi umat manusia dengan persepsi yang sama
- C. pernyataan yang banyak ditulis dalam berbagai dokumen
- D. kewajiban bagi negara yang merdeka mengakui hak asasi
- E. tercantum dalam piagam pendirian PBB

EBTANAS-SMA-00-21

Tonggak sejarah modern tentang pengakuan hak asasi manusia yang menyatakan kekuasaan raja harus dibatasi terdapat dalam ...

- A. Declaration des droits de L'home et Du citoyen
- B. The Four Freedoms of Rosevelt
- C. Piagam Magna Charta
- D. Habeas Corpus Act
- E. Declaration of Indpendence of America

EBTANAS-SMA-00-22

Perlakuan yang manusiawi terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan termasuk dalam pengakuan hak asasi manusia dalam bidang ...

- A. political rights
- B. social rights
- C. procedural rights
- D. personal rights
- E. culture rights

EBTANAS-SMA-00-23

Istilah yang digunakan dalam pengertian politik untuk kegiatan tertentu dalam m'encapai suatu tujuan adalah ...

- A. kekuasaan
- B. kebijaksanaan
- C. gerakan
- D. perjuangan
- E. revolusi

EBTANAS-SMA-00-24

Segala kegiatan manusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah negara yang berkaitan dengan warga negara pribadi (private citizen). Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia adalah ...

- A. objek politik
- B. warga negara
- C. partisipasi politik
- D. konflik kepentingan
- E. insan politik

EBTANAS-SMA-00-25

Wakil-wakil yang terpilih dalam anggota parlemen, kurang diketahui oleh pemilihnya karena menunjukkan lemahnya fungsi partai politik sebagai ...

- A. komunikasi politik
- B. rekrutmen politik
- C. sosialisasi politik
- D. pengatur konflik
- E. partisipasi politik

EBTANAS-SMA-00-26

Suatu kelompok masyarakat dalam negara menginginkan perubahan, tetapi tidak ikut serta dalam pemilihan umum disebut ...

- A. partai politik
- B. kelompok penekan
- C. gerakan
- D. kelompok kepentingan
- E. organisasi masyarakat

EBTANAS-SMA-00-27

Suatu negara yang masyarakatnya majemuk (heterogen) umumnya menggunakan sistem kepartaian ...

- A. partai tunggal
- B. dua partai
- C. multi partai
- D. partai dominan
- E. partai kompetitif

EBTANAS-SMA-00-28

Perhatikanlah data informasi berikut ini!

1. Setiap suara turut diperhitungkan.
2. Wakil lebih dekat dengan pemilihnya
3. Lebih sesuai dengan masyarakat heterogen
4. Mendorong penyederhanaan partai secara alamiah
5. Partai kecil dapat menempatkan wakilnya di parlemen

Berdasarkan data di atas, kebaikan sistem proposional dalam pemilihan umum ditunjukkan pada nomor...

- A. 1, 2, dan 4
- B. 1, 2, dan 5
- C. 1, 3, dan 4
- D. 1, 3, dan 5
- E. 2, 3, dan 5

EBTANAS-SMA-00-29

Pengertian proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dilihat dari sudut ketatanegaraan adalah ...

- A. peristiwa sejarah bagi suatu bangsa yang baru merdeka
- B. munculnya keadilan dan berakhirnya penderitaan
- C. lahirnya pernyataan hak asasi manusia Indonesia
- D. sumber hukum, pembentukan negara kesatuan
- E. pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka

EBTANAS-SMA-00-30

- Arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah ...
- A. dasar negara pengatur pemerintahan
 - B. pedoman berbagai bidang kegiatan bangsa
 - C. gambaran sikap dan peritaku manusia Indonesia
 - D. cita-cita hukum bangsa Indonesia
 - E. perjanjian luhur bangsa Indonesia

EBTANAS-SMA-00-31

- Persetujuan wakil-wakil rakyat untuk membela dan mempertahankan serta melestarikan Pancasila selamanya disebut fungsi Pancasila sebagai ...
- A. jiwa bangsa Indonesia
 - B. kepribadian bangsa Indonesia
 - C. perjanjian luhur rakyat Indonesia
 - D. cita-cita bangsa Indonesia
 - E. tujuan bangsa Indonesia

EBTANAS-SMA-00-32

- Susunan dan sistem pemerintahan negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ...
- A. ikut serta memelihara ketertiban dunia
 - B. negara melindungi kepentingan umum
 - C. negara memajukan kesejahteraan umum
 - D. susunan negara dalam undang-undang dasar
 - E. negara republik yang berkedaulatan rakyat

EBTANAS-SMA-00-33

- Makna yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 adalah ...
- A. kemerdekaan itu bukanlah akhir perjuangan
 - B. membebaskan diri dari penjajahan
 - C. kehidupan yang berkeeseimbangan
 - D. usaha pemerintah untuk kesejahteraan umum
 - E. kemerdekaan itu adalah kebebasan yang bertanggungjawab

EBTANAS-SMA-00-34

- Pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN adalah ...
- A. wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara
 - B. kewajiban MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat
 - C. usul DPR yang disampaikan kepada MPR
 - D. tugas MPR yang dinyatakan dalam UUD 1945
 - E. wewenang fraksi yang terbersardi MPR

EBTANAS-SMA-00-35

- Keanggotaan MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia adalah ...
- A. hasil dari pemilihan umum yang LUBER
 - B. sesuai dengan lapisan sosial masyarakat Indonesia
 - C. menggambarkan kemajemukah masyarakat Indonesia
 - D. berasal dari anggota DPR, utusan daerah, dan golongan
 - E. menunjukkan tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia

EBTANAS-SMA-00-36

- Menurut amandemen pertama UUD 1945 dalam Sidang Umum 1999, Presiden berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Hal ini merupakan kekuasaan ...
- A. eksekutif
 - B. federatif
 - C. yudikatif
 - D. eksaminatif
 - E. legislatif

EBTANAS-SMA-00-37

- Menyusun kebijaksanaan penerimaan dan penggunaan bantuan luar negeri dan penanaman modal bersama dengan lembaga-lembaga negara merupakan tugas dari ...
- A. Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - B. Departemen Keuangan
 - C. Badan Perencana Pembangunan Nasional
 - D. Kantor Menteri Sekretariat Negara
 - E. Kantor Menteti Negara Ekuin

EBTANAS-SMA-00-38

- Pertimbangan bagi Presiden dalam membentuk lembaga negara non-departemen adalah ...
- A. berdasarkan saran-saran yang disampaikan oleh DPA
 - B. tugas-tugas Presiden yang diamanatkan oleh GBHN
 - C. banyaknya tugas yang diemban oleh menteri negara
 - D. hasil keputusan dari sidang kabinet pimpinan Presiden
 - E. sesuai dengan usul yang disampaikan oleh DPR

EBTANAS-SMA-00-39

- Tugas yang dapat diserahkan kepada daerah sebagai pelaksanaan otonomi seluas-luasnya adalah ...
- A. pemberdayaan ekonomi rakyat
 - B. pemeliharaan pertahanan keamanan
 - C. menstabilkan nilai mata uang
 - D. membuat kebijaksanaan mpneter
 - E. melakukan hubungan diplomatik

EBTANAS-SMA-00-40

- Hukum yang berlaku hingga saat ini dalam suatu masyarakat tertentu disebut hukum ...
- A. subjektif (pribadi)
 - B. objektif (kekayaan)
 - C. positif (ius Constitutum)
 - D. formal (material)
 - E. waktu (his constituendum)

EBTANAS-SMA-00-41

- Kewajiban orang tua mengurus kehidupan anaknya yang belum dewasa termasuk dalam hukum ...
- A. perkawinan
 - B. waris
 - C. harta
 - D. keluarga
 - E. perseorangan

EBTANAS-SMA-00-42

Dalam proses pengadilan, apabila terhukum mengajukan grasi, berarti terhukum ...

- A. tidak menerima keputusan pengadilan
- B. menerima vonis dengan tidak puas
- C. menggugat keputusan pengadilan
- D. tidak puas dengan keputusan pengadilan
- E. meminta keringanan hukum

EBTANAS-SMA-00-43

Wewenang Mahkamah Agung dalam bidang legislatif adalah ...

- A. melakukan peradilan tingkat kasasi
- B. menguji secara materil peraturan pemerintah
- C. mengadili perkara pada tingkat terakhir
- D. mengusulkan perubahan undang-undang dasar
- E. mengadili perkara yang melibatkan anggota DPR

EBTANAS-SMA-00-44

Kedudukan DPR menurut UUD 1945 adalah kuat. Hal ini dapat dilihat dari ...

- A. DPR mengawasi pemerintah dan tidak dapat dibubarkan Presiden
- B. DPR mempunyai kekuasaan membuat undang-undang
- C. DPR mengajukan pertanyaan kepada Presiden
- D. DPR dapat menyampaikan memorandum kepada Presiden
- E. DPR dapat menolak anggaran yang diajukan pemerintah

EBTANAS-SMA-00-45

Lembaga negara Republik Indonesia Serikat yang mempunyai kekuasaan membuat peraturan perundangan adalah ...

- A. Presiden
- B. menteri
- C. DPA
- D. MA
- E. DPR

EBTANAS-SMA-00-46

Kedudukan badan konstituante menurut UUDS 1950 adalah ...

- A. sebagai lembaga legislatif di samping DPRS
- B. bersama DPRS memilih dan mengangkat Presiden
- C. sebagai pelaksana kedaulatan rakyat
- D. bersama pemerintah selekasnya menetapkan UUD RI
- E. bersifat sementara sebelum terbentuknya MPRS

EBTANAS-SMA-00-47

Isi yang terdapat dalam diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ...

- A. menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis
- B. menyusun lembaga-lembaga, pemerintahan daerah
- C. mengaktifkan badan pemeriksa keuangan
- D. menyusun kabinet kerja yang pertama
- E. membentuk dewan pertimbangan agung sementara

EBTANAS-SMA-00-48

Berikut ini prinsip-prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila, *kecuali* ...

- A. keseimbangan antara hak dan kewajiban
- B. keutamaan dalam kebebasan politik
- C. persatuan nasional serta kekeluargaan.
- D. mewujudkan keadilan sosial
- E. mengandung cita-cita nasional

EBTANAS-SMA-00-49

Fungsi organisasi sosial politik adalah ...

- A. menyalurkan pendapat dan aspirasi pimpinan
- B. sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat
- C. sebagai wadah untuk mendidik masyarakat
- D. menyalurkan semangat kekeluargaan dalam organisasinya
- E. menyalurkan aspirasi masyarakat dan hak politik rakyat

EBTANAS-SMA-00-50

Penambahan asas pelaksanaan pemilihan umum pada masa reformasi tahun 1999 adalah ...

- A. legitimasi
- B. demokratis
- C. jujur dan adil
- D. musyawarah
- E. jujur dan merata

EBTANAS-SMA-00-51

Alasan negara-negara yang warga negaranya sering melakukan emigrasi lebih menyukai asas sanguinis untuk menentukan status kewarganegaraannya adalah ...

- A. mengembangkan perekonomian di luar negeri
- B. mengembangkan budaya di luar negeri
- C. membaur dengan masyarakat internasional
- D. menyebarkan penduduk ke luar negeri
- E. membela negara dan membayar pajak

EBTANAS-SMA-00-52

Kehilangan kewarganegaraan menurut UU No. 62 tahun 1958 dapat disebabkan oleh ...

- A. mendirikan perusahaan di luar negeri
- B. menyimpan kekayaan di luar negeri
- C. membawa modal yang besar ke luar negeri
- D. memiliki paspor dari negara lain
- E. menetap dalam waktu yang lama di luar negeri

EBTANAS-SMA-00-53

Negara Indonesia dapat melakukan naturalisasi istimewa kepada orang asing, apabila ...

- A. mendirikan perusahaan besar di Indonesia
- B. berjasa bagi negara Indonesia
- C. pernah tinggal lama di Indonesia
- D. mendapat persetujuan dari DPR
- E. mempunyai keturunan di Indonesia

EBTANAS-SMA-00-54

Politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif mengandung makna ...

- A. menghentikan ketergantungan kepada negara lain
- B. menghindari keterlibatan dalam konflik internasional
- C. mencintai kemerdekaan dan anti penjajahan
- D. prihatin atas penjajahan dalam segala bentuknya
- E. mencintai semua bangsa dalam satu perjuangan

EBTANAS-SMA-00-55

Yang tidak termasuk tugas dan fungsi kedutaan besar RI di negara penerima adalah ...

- A. melindungi kepentingan negara RI di negara penerima
- B. meningkatkan persahabatan di negara penerima
- C. mengadakan perundingan dengan negara penerima
- D. melaporkan kepada pemerintah RI tentang negara penerima
- E. dapat memberi sanksi kepada WNI di negara penerima

EBTANAS-SMA-00-56

Perwakilan konsuler dapat melaksanakan fungsi perwakilan diplomatik apabila ...

- A. perwakilan diplomatik belum ada
- B. duta besar tidak ada di tempat
- C. jumlah perwakilan konsuler lebih dari satu
- D. perwakilan konsuler berada di ibukota negara penerima
- E. sedang terjadi pergantian pemerintahan di negara pengirim

EBTANAS-SMA-00-57

Hukum internasional publik disebut juga dengan hukum ...

- A. antarnegara
- B. bersifat umum
- C. perdata internasional
- D. perjanjian internasional
- E. kebiasaan internasional

EBTANAS-SMA-00-58

Dilihat dari jumlah peserta perjanjian internasional dapat digolongkan kepada ...

- A. bilateral dan regional
- B. multilateral dan regional
- C. regional dan kolektif
- D. bilateral dan multilateral
- E. bilateral dan unilateral

EBTANAS-SMA-00-59

Istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional yang mengatur masalah-masalah tambahan adalah ...

- A. modus vivendi
- B. proses verbal
- C. final act
- D. pertukaran nota
- E. protokol

EBTANAS-SMA-00-60

Prinsip utama ketaatan negara-negara terhadap perjanjian internasional adalah ...

- A. retroactivity
- B. teritorial scope
- C. pacta sunt servanda
- D. successive treaty
- E. full powers

EBTANAS-SMA-00-61

Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui ...

- A. perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi
- B. perundingan, ratifikasi, dan penandatanganan
- C. perjanjian, traktat, dan ratifikasi
- D. ratifikasi, perundingan, dan penandatanganan
- E. perjanjian, pendahuluan, dan traktat

EBTANAS-SMA-00-62

Apabila tujuan perjanjian internasional itu telah tercapai maka perjanjian tersebut dinyatakan ...

- A. diamandemen
- B. berakhir
- C. ditangguhkan
- D. dibatalkan
- E. telah dilanggar

EBTANAS-SMA-00-63

Contoh organisasi internasional yang bersifat regional adalah ...

- A. IMF
- B. WTO
- C. UNICEF
- D. MEE
- E. UNDP

EBTANAS-SMA-00-64

Lembaga dalam struktur ASEAN yang bertujuan merumuskan garis kebijaksanaan sesuai dengan Deklarasi Bangkok adalah ...

- A. sekretariat nasional negara anggota
- B. sidang kepala-kepala pemerintahan
- C. pertemuan kepala-kepala negara
- D. panitia tetap dan komite-komite
- E. sidang tahunan menteri luar negeri

EBTANAS-SMA-00-65

Setiap negara yang suka damai dan menerima piagam PBB dapat diterima menjadi anggota atas usul dari ...

- A. negara bersangkutan
- B. dewan perwalian
- C. dewan keamanan
- D. mahkamah internasional
- E. sekretariat jenderal

EBTANAS-SMA-00-66

Runtuhnya ideologi komunis dan bubarnya Blok Timur, implikasinya terhadap Gerakan Non-Blok adalah ...

- A. relevan karena tujuannya ingin meningkatkan kesejahteraan manusia
- B. bergesernya keberadaan organisasi internasional yang bersifat regional
- C. para anggotanya telah memfokuskan kepada dialog selatan-selatan
- D. berakhirnya gerakan karena dasar perjuangannya telah tercapai
- E. peranannya telah berkurang dibandingkan organisasi internasional lainnya

EBTANAS-SMA-00-67

Mengatur hubungan dengan perusahaan minyak asing atau negara ketiga merupakan tujuan dari ...

- A. aspek ekonomi OPEC
- B. aspek politik OPEC
- C. negara-negara minyak non OPEC
- D. negara-negara teluk produsen minyak
- E. negara Indonesia sebagai anggota OPEC

EBTANAS-SMA-00-68

Kerjasama ekonomi regional yang mengawali berdirinya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) adalah ...

- A. perjanjian pasaran bersama batu bara dan baja se Eropa
- B. rencana Komisi Spaak dalam usaha integrasi Eropa
- C. berdirinya Badan Tenaga Atom Eropa (Euratom)
- D. terbentuknya pasaran bersama Eropa (Common Market)
- E. dorongan enam negara-negara Eropa membentuk pasaran bebas

EBTANAS-SMA-00-69

Masalah ekonomi regional Asia Tenggara yang mendapat perhatian dialog negara-negara APEC adalah ...

- A. membentuk blok perdagangan dunia
- B. meningkatkan ekonomi negara anggota
- C. membentuk proteksi perdagangan
- D. mendirikan pasar bersama Asia Pasifik
- E. membendung barang industri negara maju

EBTANAS-SMA-00-70

Permasalahan utama negara-negara berkembang dalam bidang ekonomi adalah ...

- A. stabilitas yang kurang terkendali
- B. kurangnya pertumbuhan ekonomi
- C. sulitnya pembayaran hutang luar negeri
- D. proteksi yang berlebihan negara maju
- E. pemerataan pembangunan dalam negeri